

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem, proses, dan prosedur kerja yang sesuai dengan prinsip *Good Governance* di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penetapan Peta Proses Bisnis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PETA PROSES BISNIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Peta Proses Bisnis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan hubungan kerja antar unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Peta Proses, Peta Subproses dan Peta Relasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Setiap unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerja antar unit organisasi sesuai tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Peta Proses Bisnis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Peta Proses Bisnis yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini dapat diubah atau disesuaikan dengan kebutuhan organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

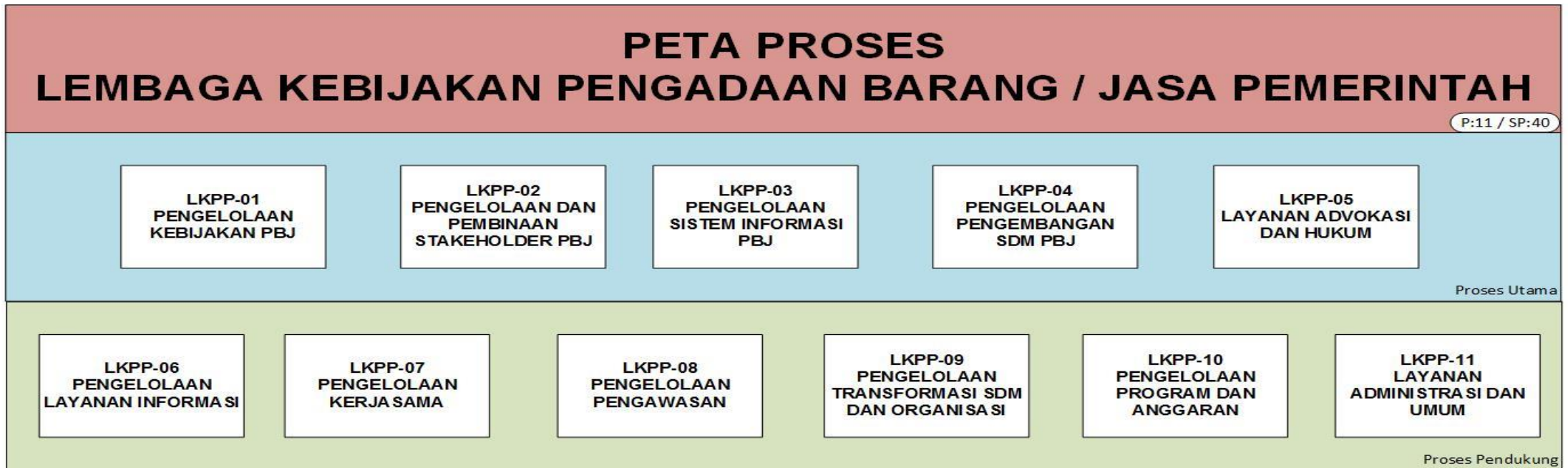
RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN
PETA PROSES BISNIS LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 6 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 JANUARI 2020

PETA PROSES BISNIS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



LKPP-01 PENGELOLAAN KEBIJAKAN PBJ

**LKPP-01.01
PENGELOLAAN
KAJIAN TENTANG
KEBIJAKAN PBJ**

**LKPP-01.02
PENGELOLAAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
TENTANG PBJ**

**LKPP-01.03
PENGELOLAAN
MONITORING &
EVALUASI
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN LKPP**

LKPP-02 PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN STAKEHOLDER PBJ

**LKPP-02.01
PEMBINAAN UKPBJ**

**LKPP-02.02
PENGELOLAAN DAN
PEMBINAAN PELAKU
USAHA**

**LKPP-02.03
PEMBINAAN
STAKEHOLDER PBJ
LAINNYA**

LKPP-03

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PBJ

LKPP-03.01
PENGEMBANGAN
SISTEM PENGADAAN
SECARA
ELEKTRONIK (SPSE)

LKPP-03.02
PENGELOLAAN
INTEGRASI SISTEM
PENGADAAN
NASIONAL

LKPP-03.03
PENGELOLAAN TATA
KELOLA TEKNOLOGI
INFORMASI PBJ

LKPP-03.04
PENGELOLAAN DATA
PBJ

LKPP-04

PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SDM PBJ

LKPP-04.01
PENGELOLAAN
PEMBINAAN
KOMPETENSI SDM
PBJ

LKPP-04.02
PENGELOLAAN
SERTIFIKASI SDM
PBJ

LKPP-04.03
PENGELOLAAN
KARIR JABATAN
FUNGSIONAL PBJ

LKPP-05 LAYANAN ADVOKASI DAN HUKUM

**LKPP-05.01
LAYANAN ADVOKASI**

**LKPP-05.02
LAYANAN HUKUM**

**LKPP-05.03
LAYANAN
PENYELESAIAN
SENKETA PBJ**

LKPP-06 PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI

**LKPP-06.01
PENGELOLAAN
*CORPORATE
BRANDING,*
PUBLIKASI, DAN
DISEMINASI**

**LKPP-06.02
PENGELOLAAN
KEPUASAN
PENGGUNA DAN
LAYANAN
PENGADUAN**

**LKPP-06.03
LAYANAN PUBLIK
LKPP**

**LKPP-06.04
PENGELOLAAN
INFORMASI UMUM,
*KNOWLEDGE
MANAGEMENT,* DAN
PERPUSTAKAAN**

LKPP-07 PENGELOLAAN KERJASAMA

**LKPP-07.01
PENGELOLAAN
KERJASAMA DALAM
NEGERI**

**LKPP-07.02
PENGELOLAAN
KERJASAMA LUAR
NEGERI**

LKPP-08 PENGELOLAAN PENGAWASAN

**LKPP-08.01
PENGELOLAAN
PENGAWASAN
INTERNAL**

**LKPP-08.02
PENGELOLAAN
FASILITASI DAN
HASIL PENGAWASAN
EKSTERNAL**

**LKPP-08.03
PENGELOLAAN
REFORMASI
BIROKRASI**

**LKPP-08.04
PENGELOLAAN
MANAJEMEN RISIKO**

LKPP-09 PENGELOLAAN TRANSFORMASI SDM DAN ORGANISASI

**LKPP-09.01
PENATAAN
KELEMBAGAAN**

**LKPP-09.02
PENGELOLAAN
TATALAKSANA**

**LKPP-09.03
PERENCANAAN DAN
PENEMPATAN SDM**

**LKPP-09.04
PENGELOLAAN
KINERJA SDM**

**LKPP-09.05
PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN
SDM**

**LKPP-09.06
PENGELOLAAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN**

LKPP-10 PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

**LKPP-10.01
PERENCANAAN
PROGRAM DAN
ANGGARAN**

**LKPP-10.02
PENGELOLAAN
PERBENDAHARAAN**

**LKPP-10.03
PENYUSUNAN
LAPORAN
KEUANGAN**

**LKPP-10.04
MONITORING DAN
EVALUASI KINERJA
LEMBAGA**

LKPP-11

LAYANAN ADMINISTRASI DAN UMUM

**LKPP-11.01
PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

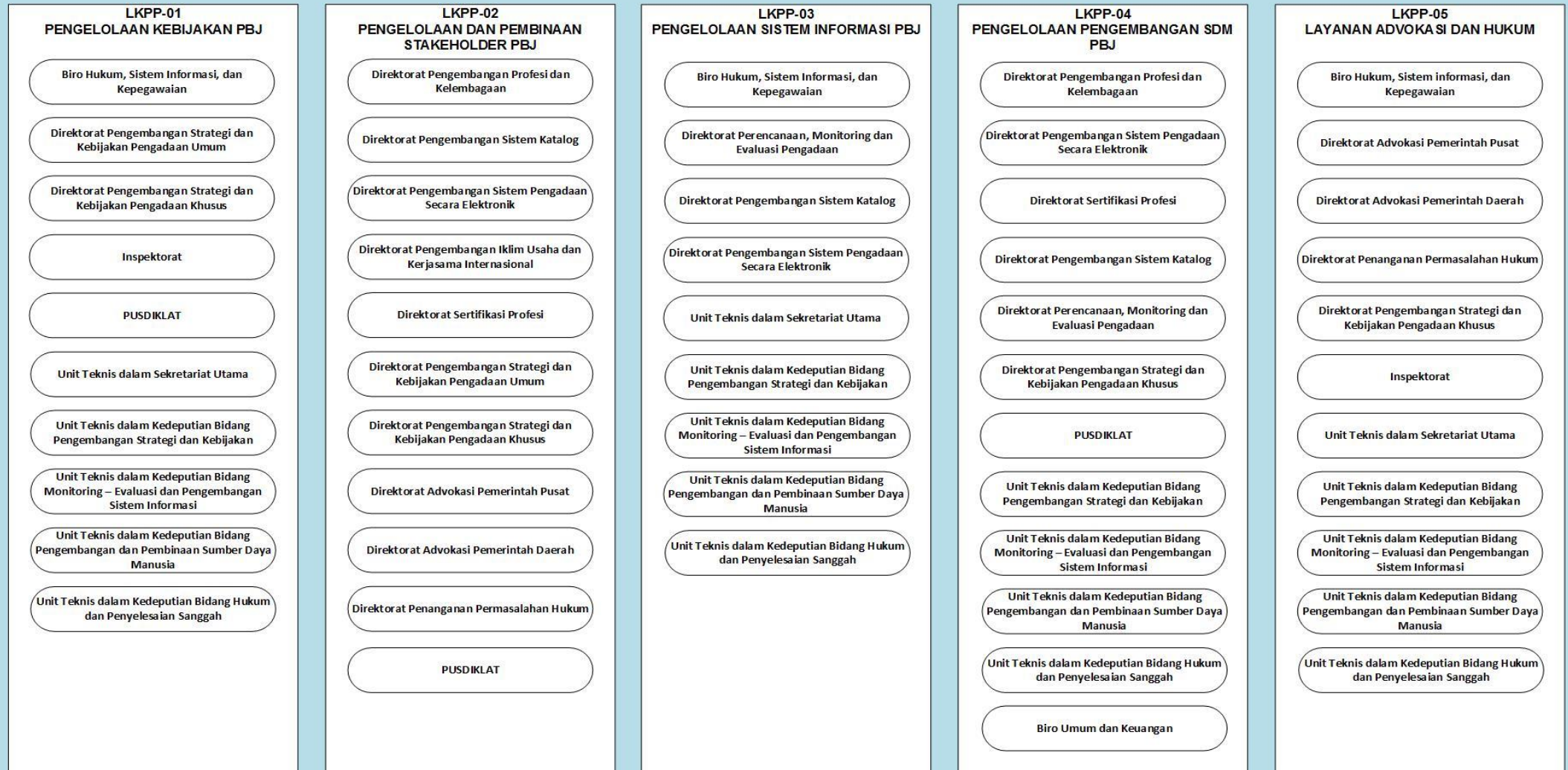
**LKPP-11.02
PENGELOLAAN
SARANA
PRASARANA DAN
BMN**

**LKPP-11.03
PENGELOLAAN TATA
PERSURATAN DAN
ARSIP**

**LKPP-11.04
PENGELOLAAN
KEPROTOKOLAN
DAN ADMINISTRASI
PIMPINAN**

PETA RELASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

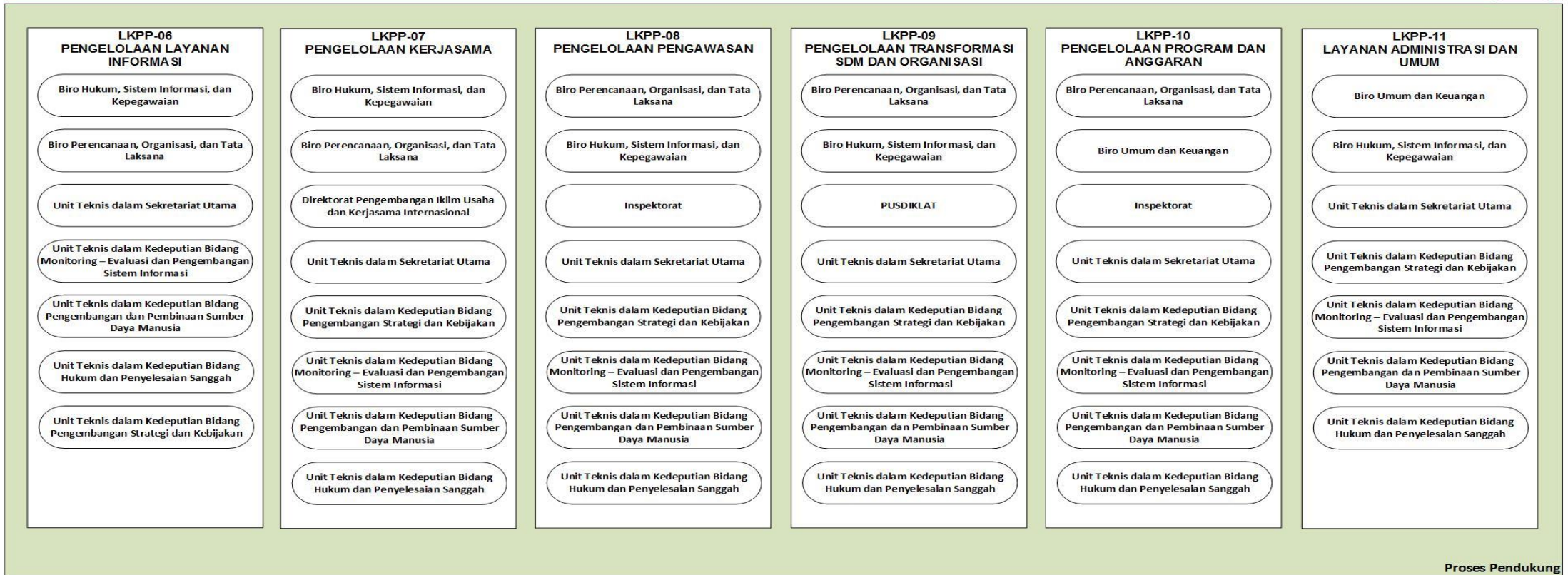
P:11 / SP: 40



Proses Utama

PETA RELASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

P:11 / SP: 40



KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO